

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR DAN PROPOSISI

2.1. Kajian Pustaka

Untuk membantu menyelesaikan masalah dalam penelitian ini, penulis menyajikan teori-teori serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dan berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini yang akan diuraikan secara singkat.

2.1.1. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai referensi dan acuan dalam melakukan penelitian, berikut beberapa kajian penelitian terdahulu:

- 1) Penerapan *E-Government* Dalam Meningkatkan Pelayanan Pendidikan Di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Buleleng oleh Juliawati (2019).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa sudah terdapat penerapan berbasis *E-Government* di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Buleleng, yakni penerapan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) dan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG). Secara umum, penerapan berbasis E-Government ini telah berjalan secara optimal, namun masih terdapat beberapa kekurangan dalam penerapannya seperti adanya perangkapan tugas bagi staf yang bertugas mengelola LPSE dan SIMPEG secara infrastruktur sumber daya manusia yang masih belum memenuhi standar atau kualifikasi dalam penerapan E-Government. Dengan menggunakan 6 indikator penerapan e-Government yakni Infrastruktur Data, Infrastruktur Legal, Infrastruktur Instusional, Infrastruktur Manusia, Infrastruktur Teknologi dan Strategi Pemimpin.

- 2) Dukungan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian terhadap Pengambilan Keputusan di BKPP Kab. Sukoharjo oleh Riana (2019).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam Proses Penerapan SIMPEG di BKPP Kabupaten Sukoharjo terdapat sub sistem pengumpulan data, sub system *input* data, sub system pengolahan data dan sub sistem *output* informasi, serta didukung oleh

komponen-komponen pendukung yang terdiri dari *hardware* (perangkat keras) *software* (perangkat lunak), *database* , sumber daya jaringan dan brainwase (SDM). Informasi yang dihasilkan oleh SIMPEG di BKPP saat ini sudah mampu mendukung dalam pengambilan keputusan penempatan, mutasi dan pensiun pegawai . Kendalayang dihadapi dalam penerapan SIMPEG di BKPP Kabupaten Sukoharjo yaitu, keterbatasan anggaran dan keterlambatan dalam input *data*.

3) Penerapan *E-Government* pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pekanbaru oleh Muhammad (2018).

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan SIMPEG di BKD Kota Pekanbaru cukup efektif. Efektivitas di analisis berdasarkan tiga kriteria : produksi, efisiensi,dan berkelanjutan. Dari Kriteria Produksi, SIMPEG membutuhkan lebih banyak perbaikan agar lebih efektif. Dari kriteria efisiensi, ditemukan bahwa BKD Pekanbaru perlu menambahkan jumlah staf yang mengoperasikan SIMPEG. Kemudian dari kriteria yang berkelanjutan, implementasinya cukup baik. Namun pelatihan dan control lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan kualitas SIMPEG. Selain itu, penelitian ini juga menemukan baha kendala yang terjadi selama implementasi adalah kurangnya koneksi internet, sumber daya manusia, alat pendukung, dan pelatihan. Selain itu, juga menemukan beberapa staf yang kurang sadar tentang pentingnya SIMPEG.

Tabel 2.1
Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan Dan Perbedaan			
			Teori Yang Digunakan	Pendekatan	Metode	Teknik Analisis

1.	Juliawati (2019)	Penerapan <i>E-Government</i> Dalam Meningkatkan Pelayanan Pendidikan Di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Buleleng	Teori Menurut Indrajit (2002)	Analisis	Kualitatif	Analisis Kualitatif
2.	Riana (2019)	Dukungan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian terhadap Pengambilan Keputusan di BKPP Kab. Sukoharjo	<i>Barkha (2013)</i>	Deskriptif	Kualitatif	Deskriptif Kualitatif
3.	Muhammad (2018)	Penerapan <i>E-Government</i> pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pekanbaru	<i>Permendagri No.157 Tahun 2000</i>	Analisis	Kualitatif	Analisis Kualitatif

Sumber: Juliawati 2019, Riana 2019 dan Muhammad 2018, Diolah Peneliti 2022.

2.1.2. Kajian Teori Administrasi Publik

Dalam proses administrasi pada umumnya terdapat kerjasama antara dua orang atau lebih dan kelompok yang terdiri dari kelompok-kelompok yang di suatu negara baik bidang swasta, sipil atau militer yang bekerjasama di suatu organisasi dalam proses mencapai tujuan yang sudah disepakati sebelumnya. Kata administrasi dibagi menjadi dua pengertian.

Ulbert Sillalahi (2016:5) dalam bukunya Studi Tentang Ilmu Administrasi administrasi dalam arti sempit dan administrasi dalam arti luas mengemukakan bahwa:

“Administrasi merupakan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam hubungannya satu sama lain dan administrasi dalam arti luas yaitu Administrasi berhubungan dengan kegiatan kerja sama yang dilakukan manusia atau sekelompok orang sehingga tercapai tujuan yang diinginkan”.

Pengertian Publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kesamaan berpikir, perasaan, harapan, berpikir, perasaan, harapan, sikap dan sikap dan tindakan yang tindakan yang benar dan benar dan baik berdasarkan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki (Syafi'ie dkk dalam Pasolong, 2011 :6). Administrasi publik menurut **Chandler dan Plano dalam Keban (2008:4)** adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

Masih dalam referensi yang sama Keban menyatakan bahwa istilah Administrasi publik menunjukkan bagaimana pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa memosisikan sebagai regulator yang aktif dan penuh berinisiatif dalam pengaturan ketika pengambilan arah yang dirasa penting dan baik untuk masyarakat luas (**Keban, 2008: 4**)

Adapun peran administrasi publik menurut **Gray (1989:15-16) dalam buku "Teori Administrasi Publik" (2017:9)** menjelaskan poin penting peran daripada administrasi publik dalam masyarakat sebagai berikut:

- 1) Menjamin pemerataan distribusi pendapatan nasional secara inklusif kepada kelompok masyarakat kurang mampu atau miskin dengan berdasarkan prinsip keadilan.
- 2) Memberi perlindungan kepada hak-hak rakyat atas kepemilikan kekayaan serta adanya penjaminan kebebasan bagi rakyat agar dapat melaksanakan tanggung jawab atas diri mereka sendiri dalam sektor pelayanan strategis seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan pelayanan utamanya bagi masyarakat lanjut usia.
- 3) Melestarikan nilai tradisi masyarakat yang amat bervariasi serta memberi jaminan dan dukungan sumber-sumber sehingga nilai-nilai akan mampu berkembang sesuai relevansi perubahan zaman serta selaras dengan budaya lain dilingkungannya.

2.1.3. Kajian Teori Kebijakan Publik

Kebijakan atau dalam Bahasa Inggris yaitu *Policy* dalam KBBI didefinisikan sebagai rangkaian-rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dari rencana untuk pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak, tujuan untuk usaha mencapai tujuan tertentu.

Sebagaimana dikutip Taufiqurokhman dalam buku Kebijakan Publik menurut Agustino (2014: 2) menjelaskan kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau Pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut.

Menurut Solichin Abdul Wahab arti kebijakan itu sendiri selalu terjadi silang pendapat dan menjadi ajang perdebatan para ahli. Oleh karena itu, untuk memahami 19 istilah kebijakan Solichin Abdul Wahab (2008, 40-50) mengemukakan beberapa pedoman yaitu seperti berikut:

- a. Kebijakan diharuskan berbeda dengan keputusan.
- b. Kebijakan tidak serta merta dapat dibedakan dengan administrasi.
- c. Kebijakan termasuk perilaku juga harapan-harapan
- d. Kebijakan termasuk ketidak adanya tindakan dan ada tindakan.
- e. Kebijakan memiliki nilai yang ingin dicapai.
- f. Kebijakan mempunyai tujuan eksplisit dan implisit.
- g. Kebijakan muncul dari proses.
- h. Kebijakan berhubungan dengan organisasi dan intra-organisasi.
- i. Kebijakan dirumuskan secara subjektif.

Lingkup kebijakan publik sangat luas karena kebijakan publik dapat mencakup berbagai aspek seperti bidang dan sector ekonomi, sosial, politik, budaya, hukum dan lainnya. Kebijakan publik dapat bersifat regional, nasional maupun lokal seperti contoh undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, peraturan Menteri, Peraturan Pemerintah Daerah/Provinsi, dan lain sebagainya.

Easton dalam Taufiqurokhman (2014:3) mengemukakan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga memberikan arti kebijakan publik sebagai *projected program of goal, value and practice* atau suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek yang terarah.

2.1.3.1. Kategori Kebijakan Publik

Ada banyak sekali kategori Kebijakan Publik dan berikut ini merupakan kategori-kategori kebijakan publik menurut para ahli :

James E. Anderson dalam Taufiqurokhman (2014:5) menyampaikan kategori kebijakan publik sebagaimana berikut ini:

- a. Kebijakan Substantif dan Prosedural

Kebijakan Substantif ialah kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan procedural merupakan kebijakan yang kebijakan substantif tersebut dijalankan.

b. Kebijakan Distributif dan Kebijakan Regulatori versus Kebijakan Redistributif.

Kebijakan Distributif menyangkut distribusi pelayanan kemamfaatan kepada masyarakat atau individu. Kebijakan Regulatori adalah kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu dan atau perilaku kelompok masyarakat. Kebijakan Redistributif ialah kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan pemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam suatu masyarakat.

c. Kebijakan Materal dan Kebijakan Simbolik

Kebijakan Materal merupakan kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya komplet pada kelompok sasaran sedangkan Kebijakan Simbolis yaitu kebijakan yang memberikan mamfaat simbolis pada kelompok sasaran.

d. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (*Public Goods*) dan Kebijakan barang privat (*Privat Goods*)

Kebijakan *Public Goods* adalah kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. *Privat Goods* merupakan kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk bebas pasar.

2.1.3.2. Dimensi Kebijakan Publik

Kebijakan publik memiliki dimensi-dimensi untuk mengukur dan mengevaluasi suatu kebijakan publik demi mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dimensi tersebut dijelaskan oleh Hardiansyah, 2018: satu yang diantaranya yaitu: konsistensi, transparansi, akuntabilitas, keadilan, partisipatif, efektifitas dan efisiensi.

1) Konsistensi

Kebijakan publik terlaksana dengan baik apabila pelaksanaan kebijakan publik dilaksanakan secara konsisten dan berpegang teguh pada peraturan atau prosedur dan norma yang berlaku.

2) Transparansi

Transparansi dapat terlihat apabila terdapat kebebasan akses yang dapat dilakukan oleh publik atau kelompok yang memiliki kepentingan. Transparansi informasi harus tersedia

dan bersifat terbuka, mudah diakses, dimengerti dan memadai oleh publik atau kelompok yang mempunyai suatu kepentingan.

3) Akuntabilitas

Pelaksanaan suatu kebijakan publik harus dipertanggung jawabkan oleh pemangku kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Keadilan

Keadilan dalam suatu kebijakan publik dapat berupa tidak membedakan pelayanan kepada golongan tertentu atau tidak bersikap deskriminatif.

5) Partisipatif

Partisipatif artinya masyarakat berperan dalam keterlibatannya pada pelaksanaan kebijakan. Selain sebagai penopang pelaksanaan kebijakan, masyarakat berperan sebagai sarana untuk evaluasi dan pengontrolan terhadap wewenang pelaksana kebijakan.

6) Efektivitas

Efektivitas berkaitan dengan pencapaian kebijakan berdasarkan tindakan dan aspek rasionalitas tindakan yang berkaitan dengan layanan atau produk. Pelaksana kebijakan dikatakan efektif apabila mencapai sasaran dan atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

7) Efisiensi

Efisiensi berkaitan dengan kuantitas dalam memaksimalkan sumber daya seperti pencapaian tujuan, penggunaan manusia, biaya, waktu, dan peralatan lainnya. Efisiensi dapat berdampak terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan.

2.1.3.3. Proses Kebijakan Publik



Gambar 2.1

Proses Kebijakan Publik

Sumber: Willian N. Dunn (Taufiqurohkhman, 2014: 16)

Proses kebijakan publik merupakan serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan untuk kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis ini dapat dilihat dari serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Sedangkan menurut Willian. N. Dunn Proses kebijakan publik menyangkut perumusan masalah, forecasting, rekomendasi, monitoring dan evaluasi.

2.1.3.4. Formulasi Kebijakan Publik

Formulasi Kebijakan Publik menurut Thomas R. Dye dalam Kadji (2016: 31-39) merumuskan beberapa formulasi kebijakan yang diantaranya sebagai berikut ini:

1) Model Teori Kelompok

Model teori kelompok mengandalkan kebijakan sebagai titik keseimbangan. Inti gagasan ini yaitu interaksi didalam kelompok yang kompromitis akan menghasilkan keseimbangan sekaligus untuk memperkuat kompromi merupakan hal terbaik dalam membuat kebijakan publik. Terdapat beberapa indikator dalam model teori kelompok yaitu:

- a. Rumuskan aturan main antar *interest group*
- b. Menata kompromi dalam kebijakan dan seimbangkan kepentingan
- c. Terbentuknya kompromi dalam kebijakan
- d. Memperkuat kompromi-kompromi.



Gambar 2.2

Formulasi Kebijakan Model Teori Kelompok

Sumber: Thomas R. Dye dalam Kadji (2016: 31-39)

Sumber: Thomas R. Dye (Kadji, 2016: 31-39), di desain Oleh Peneliti, 2022.

2) Model Kelembagaan

Model kelembagaan menurut Thomas R. Dye menyatakan bahwa tugas membuat kebijakan publik adalah tugas pemerintah. Model ini menegaskan bahwa:

- a. Pemerintah sah dan memiliki otoritas dalam membuat kebijakan publik.
- b. Kebijakan publik bersifat umum atau universal.
- c. Pemerintah memegang fungsi pemaksaan kebijakan.

3) Model Teori Elit

Model ini berkembang dari teori politik elit-massa yang mendasar pada asumsi bahwa didalam setiap anggota masyarakat pasti ada dua kelompok, yaitu pemegang kekuasaan dan elite dan tidak memiliki kekuasaan atau massa. Indikator model ini adalah:

- a. Preferensi politik para elite.
- b. Top down.
- c. Adanya administrator publik sebagai implementor kebijakan.
- d. Konservatif.
- e. Status quo.

4) Model Proses

Model proses lebih mempertimbangkan *step by step* formulasi kebijakan daripada fokus terhadap substansi hal-hal penting yang harus ada dalam kebijakan tersebut. Rangkaian model tersebut dalam dilihat seperti dibawah ini:

- a. Identifikasi Permasalahan.
- b. Menata agenda formulasi kebijakan.
- c. Perumusan proposal kebijakan.
- d. Legitimasi kebijakan.
- e. Implementasi kebijakan.
- f. Evaluasi kebijakan.

5) Model Teori Rasionalisme

Formulasi kebijakan ini dalam model ini menekankan dan disusun seperti berikut ini:

- a. Mengetahui preferensi publik dan kecenderungannya.
- b. Menentukan pilihan-pilihan.
- c. Menilai konsekuensi pilihan.
- d. Menilai rasio sosial yang dikorbankan.
- e. Pilihan alternatif kebijakan yang paling efektif.

6) Model Inkrementalis

Model ini merupakan kritik terhadap model rasional dan indikator dalam model ini diantaranya sebagai berikut ini:

- a. Kebijakan berlanjut
- b. Pragmatis atau Praktis
- c. Sebab ketidakpastian
- d. Komitmen masa lalu
- e. Pertahankan kinerja yang telah dicapai

7) Model Teori Permainan

Model ini di klaim sebagai model konspiratif yang dimana mulai muncul sejak awal berbagai pendekatan yang sangat rasional dan tidak mampu menyelesaikan pertanyaan yang muncul dan sulit untuk diterangkan dengan fakta dan data yang tersedia. Indikator model ini yaitu sebagai berikut ini:

- a. Konspiratif.
- b. Defensif.
- c. Ofensif.
- d. Posisi superior.

e. Dukungan sumber daya.

8) Model Pilihan Publik

Model pilihan publik melihat pada kebijakan sebagai sebuah proses formulasi keputusan kolektif dari individu-individu yang berkepentingan atas keputusan. Indikator dalam model ini yaitu:

- a. Preferensi publik.
- b. Demokratis.
- c. Kontribusi publik.
- d. Kontrak sosial.

9) Model Demokratis

Model demokrasi menegaskan bahwa setiap pengambilan keputusan harus sebanyak mungkin mengelaborasi suara dari *stakeholder*. Model penerapannya pada *good governance* bagi sistem pemerintahan dengan memerintahkan agar dalam membuat kebijakan para konstituen dan pemamfaat kebijakan diakomodasi keberadaannya. Model formulasi kebijakan menurut David Easton dalam Kadji (2016: 39-40) dalam model sistem ini kebijakan publik dipandang sebagai tanggapan dari suatu sistem politik terhadap ekspektasi dan tuntutan yang muncul dari lingkungan yang merupakan kondisi atau keadaan yang berada diluar batas-batas politik.

Kekuatan politik yang muncul dari dalam lingkungan dan mempengaruhi sistem kebijakan politik dipandang sebagai masukan (*input*) sementara hasil yang dikeluarkan dalam kebijakan dipandang sebagai keluaran (*output*).

2.1.4. Kajian Teori Impelemtasi

Implementasi yang merupakan terjemahan dari kata "*implementation*", berasal dari kata kerja "*to implement*". Menurut Webster's Dictionary dalam Tachjan (2006: 23), kata *to implement* berasal dari bahasa Latin "*implementum*" dari asal kata "*impere*" dan "*plere*". Kata "*implere*" dimaksudkan "*to fill up*"; "*to fill in*", yang artinya mengisi penuh; melengkapi, sedangkan "*plere*" maksudnya "*to fill*", yaitu mengisi.

Pengertian implementasi secara sederhana yaitu seperti yang diutarakan oleh Jones 1991 dalam buku *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Joko Pranomo (2020: 57) Implementasi sebagai *getting the job done* dan *doing if*. Dalam kesederhanaan rumusan yang demikian berarti bahwa implementasi kebijakan adalah suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah.

Abdul Wahab 1991 (Pranomo, 2020: 58) mengemukakan implementasi kebijakan merupakan hal yang sangat penting bahkan lebih penting dari pembuatan kebijakan.

Mazmanian dan Sebatier (dalam Waluyo, 2007:49) mengidentifikasi bahwa:

“Implementasi merupakan pelaksanaan terhadap kebijakan keputusan dasar berbentuk undang-undang, namun dapat berbentuk perintahperintah atau keputusan-keputusan eksekutif terhadap badan peradilan, mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, secara tegas menyebutkan bahwa tujuan atau sasaran yang ingin dicapai tersebut dengan berbagai cara dilakukan secara terstruktur untuk mengatur sebuah proses implementasinya”

Implementasi menurut Mazmanian dan Sebatier merupakan pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk undang-undang juga berbentuk perintah atau keputusankeputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan.

2.1.5. Kajian Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Bisa kita paparkan bahwa Implementasi Kebijakan merupakan suatu tindakan untuk mencapai sebuah tujuan yang telah direncanakan dengan matang dan tentu itu sebelum mengambil keputusan. Implementasi kebijakan publik menjadi salah satu tahapan paling penting didalam siklus kebijakan publik secara aktual. Widodo (Pratama, 2013:230), menyampaikan bahwa Implementasi Kebijakan Publik adalah tahapan dari adanya proses kebijakan publik (public policy proces) studi yang sangat crucial. Lester dan Stewart (Nastia, 2014:201) mengatakan bahwa :

“Implementasi suatu proses dari adanya sebuah hasil (output) yang dapat diukur dan dilihat atas keberhasilan implementasi kebijakan demi tercapainya tujuan hasil akhir (output) atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih dalam kebijakan”.

Wahab 2014:55 (Alamsyah, 2016) mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah :

“Implementasi kebijakan sebuah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undangundang, dapat pula berbentuk perintah- perintah atau keputusan eksekutif atau keputusan badan peradilan lazimnyayang penting sehingga keputusan tersebut mampu mengidentifikasi permasalahan yang dapat diatasi, membuat secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai dalam berbagai cara agar dapat menstruktur/mengatur proses implementasi kebijakan.”

Menurut George C. Edward III (Pranomo, 2020: 4-6) mengemukakan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yang diantaranya sebagai berikut ini:

- 1) Komunikasi

Komunikasi menjadi kunci keberhasilan dalam implementasi kebijakan mensyaratkan untuk implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana dan menjadi tujuan dan sasaran kebijakan tersebut harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

2) Sumber Daya

Sumber daya menjadi hal penting meskipun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan maka implementasi tidak akan berjalan dengan efektif. Sumber daya dapat berwujud SDM seperti kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

3) Disposisi

Sifat dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti, kejujuran, komitmen dan sifat demokratis.

4) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yaitu yang bertugas mengimplementasikan kebijakan dan mempunyai pengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi sendiri yaitu mencakup SOP (*Standard Operational Procedure*) dan fragmentasi.

Menurut Grindle dalam Pranomo (2020: 6-7) Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar, yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Variabel yang disebutkan di atas mencakup: sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target grup termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target grup, sejauhmana perubahan yang diinginkan dalam sebuah kebijakan, apakah letak program sudah tepat, apakah sebuah program sudah menyebut dengan rinci implementornya dan apakah sebuah program sudah didukung dengan sumber daya yang memadai.

2.1.6. *Good Governance*

Good governance pada umumnya dipahami sebagai tata Kelola pemerintah yang baik.

Pada dasarnya *good governance* adalah proses dalam pengambilan keputusan dalam hal kebijakan publik yang dapat dipertanggung jawabkan dalam menacapai tujuan-tujuan publik.

Good governance sebagai sebuah konsep yang menekankan kolaborasi antara tiga pilar yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Oleh karena itu *good governance* ditujukan untuk

meningkatkan peranan dari pihak swasta dan juga masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dalam hal kebijakan publik.

Pengertian *good governance* sebagaimana dinyatakan oleh Sedarmayanti dan Yaya (2020:3) dalam bukunya *Dinamika governance di era revolusi 4.0* *good governance* merupakan landasan nilai penyelenggaraan pemerintah saat ini, pada prinsipnya menekankan tentang pentingnya kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara sektor publik, sektor swasta dan masyarakat. *Governance* meliputi tiga sektor seperti yang dikemukakan oleh (Sedarmayanti, 1995:5), *Intitusi* dan *good governance* meliputi tiga pilar yaitu *state* (negara atau pemerintah), *private sector* (sektor swasta atau dunia usaha) dan *society* (masyarakat), yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing. Sedarmayanti dan Yaya (2020:17) dalam bukunya *Dinamika governance di era revolusi 4.0* mengemukakan *good governance* adalah proses penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara berbagai sumber daya dalam negara, sektor swasta dan masyarakat.

Prinsip-prinsip *good governance* Dalam peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 2000 tentang Pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil, detail peraturan, prinsip-prinsip pemerintahan yang baik terdiri dari:

a. Profesionalitas

Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau.

b. Akuntabilitas

Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Menciptakan kepercayaan timbala balik antara pemerintah dan masyarakat melalui

penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

d. Pelayanan Prima

Penyelenggaraan pelayanan publik yang menyangkut prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana dan prasarana, serta pelayanan yang ramah dan disiplin.

e. Demokrasi dan Partisipasi

Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dan menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

1.1.7. Konsep *Good Governance*

Konsep “*governance*” melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara ,tetapi juga peran dari beberapa actor diluar pemerintah serta negara. Sehingga pihak pihak yang terlibat semakin luas. Seperti yang dikatakan oleh Effendi beliau mengemukakan bahwa “konsep *governance* dalam masyarakat sering dirancukan dengan konsep *government*. Konsep *Governance* lebih inklusif daripada *Government*.”

Pengertian *Good Governance* bisa diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. Dalam hal ini, *World Bank* lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya social dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat berbeda halnya dengan *United Nation Development Program* (UNDP) lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi,dan administratif dalam pengelolaan negara. *Good Governance* sebagai suatu terminology yang populer sejak awal tahun Sembilan puluhan, seolah-olah formula yang baru diketemukan untuk tetap mekanisme pemerintahan suatu negara agar berjalan secara demokratis.

Menurut Koiman (2009), *governance* merupakan serangkaian proses interaksi social politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atau kepentingan-kepentingan tersebut.

Sedarmayanti (2004), mengelompokkan unsur pemerintahan (*governance stakeholders*) kedalam 3 kategori yaitu :

- a. Negara/pemerintahan, konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani (*Civil Society Organization*).
- b. Sektor Swasta, pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam system pasar, seperti : industry pengolahan (*manufacturing*), perdagangan, perbankan, dan koperasi, termasuk kegiatan sector informal.
- c. Masyarakat Madani (*Civil Society*), kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada diantara atau ditengah-tengah pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara social, politik, dan ekonomi

Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah sebagai unsur utama penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan pengayom dan pelayanan masyarakat sudah seharusnya menjunjung tinggi Asas umum pemerintahan negara yang baik sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi. Korupsi dan Nepotisme yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatuhan dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih.

2.1.8. Konsep *E-Government*

Electronic Government adalah mekanisme interaksi antara pemerintah dengan masyarakat melalui system informasi berbasis internet dan teknologi digital lainnya dengan tujuan memperbaiki mutu dan kualitas pelayanan public yang efisien, dan efektif.

Menurut Kepres No.20 tahun 2006, E-Government adalah pemanfaatan teknologi dan informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan

efisiensi,efektivitas,transparasi,dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat,komunitas bisnis,dan kelompok terkait lainnya menuju *good governance*.

E-Government bertujuan untuk meningkatkan akses warga negara terhadap jasa-jasa layanan public pemerintah, meningkatkan akses masyarakat ke sumber-sumber informasi yang dimiliki pemerintah, menangani keluhan masyarakat dan juga persamaan kualitas layanan public yang berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sehingga layanan public menjadi lebih transparan akuntabel, efektif, dan efisien.

Menurut Indrajit (2002) *E-Government* suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan, dengan melibatkan penggunaan teknologi informasi terutama internet dengan tujuan memperbaiki mutu kualitas pelayanan. Menurut Fuadi dan Wardiyanto (2010). *E-Government* adalah sebuah garis depan dari rencana pemerintah untuk mendukung serta menyediakan informasi dan peningkatan pelayanan pda masyarakat, pekerja pemerintah,unit-unit pemerintah lain dan organisasi sektor ketiga.

Menurut Hardiansyah (2010), *E-Government* adalah kumpulan konsep untuk semua tindakan dalam sektor publil baik ditingkat pemerintah pusat maupun di tingkat pemerintah daerah yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka mengoptimalisasi proses pelayanan public yang efisien, transparan, dan efektif. Menurut Adriwati (2001), *E-Government* merupakan system informasi yang menggunakan internet dan teknologi digital lain untuk melakukan transaksi, layanan publik, komunikasi, koordinasi, dan manajemen organisasi pemerintah, yang meliputi layanan *government to government*, *government to business* dan *government to society*.

Menurut Indrajit (2005), tujuan pengembangan E-government yaitu :

- a. Dengan E-Government pemerintah ingin memberikan penawaran yang luas mengenai beberapa informasi penting yang dibutuhkan masyarakat dan juga pilihan akses terhadap layanan pemerintah.
- b. Mengembangkan transparansi yang lebih luas dalam proses pelayanan publik, karena masyarakat bisa mendapatkan informasi tentang berbagai program dan kegiatan pemerintah dan masyarakat bisa melakukan control dan pertanggungjawaban lebih besar terhadap apa yang dilakukan pemerintah
- c. dukungan dan partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi yang luas akan menjamin keputusan yang diambil memenuhi aspirasi masyarakat menuju proses pemerintahan yang transparan dan demokratis.
- d. menggantikan peran penyediaan layanan kepada masyarakat, dimana mereka bisa mendapatkan informasi dan layanan dengan mendatangi kantor-kantor pemerintahan, melalui *E-Government* masyarakat mempunyai pilihan akses yang lebih banyak.

Menurut Indrajit (2002), Strategi pengembangan E-Government dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pengembangan infrastruktur dan akses jaringan komunikasi data yang memadai
- b. Pengembangan SDM untuk mengelola *E-Government*
- c. Pengembangan perangkat lunak yang diperlukan
- d. Pengembangan basis data (*database*) dan basis pengetahuan (*knowledge basis*)
- e. Pengembangan organisasi dan tata kerja yang mendukung *E-Government*
- f. Pemeliharaan dan perawatan perangkat lunak dan keras (jaringan)
- g. Pengembangan koordinasi layanan informasi yang mampu mendukung terwujudnya masyarakat yang kompetitif serta menarik investasi ke daerah.

2.1.9. Kompleksitas Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (*SIMPEG*)

Sistem informasi manajemen adalah sebuah system manusia atau mesin yang terpadu, untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi (Davis, 2002). Menurut Hartono (2013) definisi sistem informasi manajemen adalah “Sistem Informasi Manajemen adalah sebuah sistem, yaitu rangkaian terorganisasi dari sejumlah bagian atau komponen yang secara Bersama-sama berfungsi atau bergerak menghasilkan informasi untuk di gunakan dalam manajemen perusahaan.”

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 “Sistem informasi manajemen berfungsi untuk mengolah data, manajemen dan administrasi kepegawaian di lingkungan pemerintah daerah. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (*SIMPEG*) mempunyai tujuan untuk terwujudnya suatu sistem informasi manajemen pengelolaan kepegawaian yang terintegrasi dalam suatu jaringan computer, yang mampu menghasilkan informasi yang bermutu guna menunjang pengambilan keputusan manajemen sumberdaya manusia di bidang pemerintahan

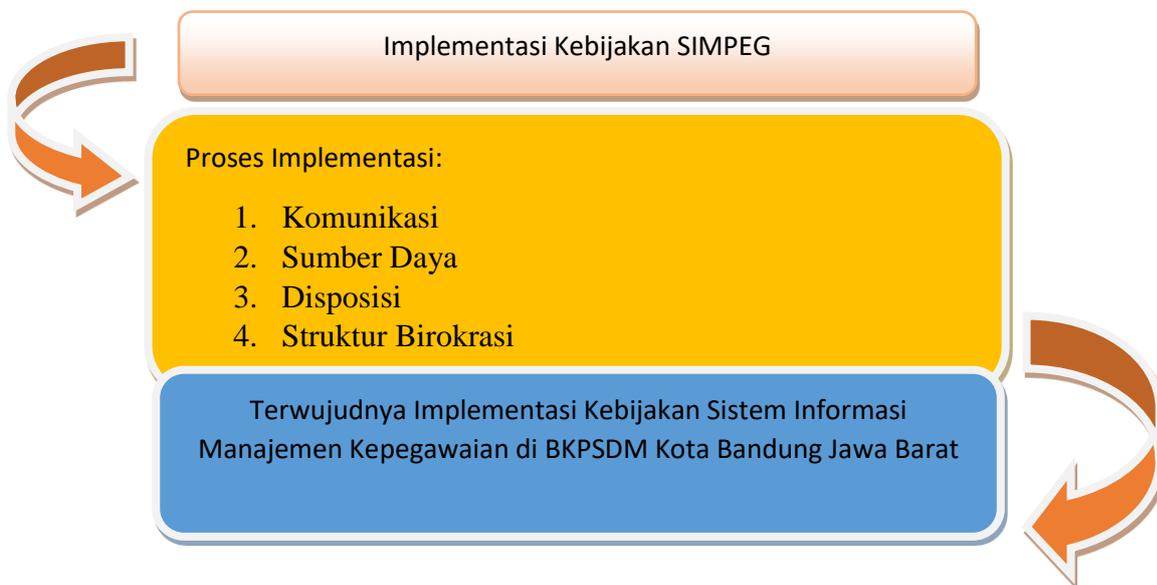
Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (*SIMPEG*) sangat penting untuk memberikan pelayanan semua personalia yang ada, karena pegawai merupakan asset penting dalam penyelenggaraan organisasi yang harus dikelola dengan baik. Pengelolaan pegawai yang baik dimulai dalam lingkup yang kecil, dengan itu akan meningkatkan kinerja pegawai sedangkan untuk lingkup besar akan membawa perbaikan kinerja pemerintah secara keseluruhan.

Menurut Murdick dan Ross (Sutabri,2003) sistem informasi manajemen adalah proses komunikasi dimanasi informasi masukan (*input*) direkam disimpan dan diproses untuk menghasilkan “*ouput*” yang berupa keputusan tentang perencanaan, pengoperasian, dan pengawasan. Agar menjadi efektif, Sistem Informasi Manajemen harus mendapat data dengan titik asalnya, dan kemudian disalurkan ke tempat pengolah informasi dimana data itu dibuat

dan digunakan.

1.2. Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk mendeskripsikan bagaimana kerangka berpikir yang ada terkait dengan “Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Dalam Mewujudkan *Good Governance* di BKPSDM Kabupaten Pangandaran.” Seperti berikut ini:



Gambar 2.2

Kerangka Berpikir

Sumber: Edward III (Pranomo, 2020: 4-6)

1.3. Proposisi

Berdasarkan mengenai Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Dalam Mewujudkan *Good Governance* di BKPSDM Kota Bandung Jawa Barat untuk mewujudkan Implementasi Kebijakan ditentukan oleh Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.